

EVALUASI STRATEGI OPERASIONAL PENEMPATAN PASUKAN DALAM MENGATASI KONFLIK DOMESTIK: PENDEKATAN MILITER DAN POLISI

Aris Sarjito

Prodi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik
Indonesia
arissarjito@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to analyze the effectiveness of operational strategies employed by the military and police in managing domestic conflicts. Using a qualitative approach with secondary data analysis, this study examines various case studies to understand the impact of these strategies in different socio-political contexts. The findings indicate that the police are more effective in handling small-scale social conflicts through community-based approaches, while the military is essential in responding to large-scale threats such as terrorism or separatism. However, prolonged military involvement in domestic security often leads to distrust and human rights concerns. The study recommends optimizing the role of the police in preventive security measures, defining clear limitations on military engagement in domestic affairs, and improving coordination between both institutions. Future researchers are encouraged to explore the role of technology and artificial intelligence in enhancing security strategies while ensuring compliance with human rights principles.

Keywords: domestic conflict, human rights, military strategy, police operations, security policy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi operasional yang diterapkan oleh militer dan kepolisian dalam menangani konflik domestik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis data sekunder, penelitian ini menelaah berbagai studi kasus untuk memahami dampak strategi keamanan dalam konteks sosial-politik yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian lebih efektif dalam menangani konflik sosial berskala kecil melalui pendekatan berbasis komunitas, sementara militer diperlukan dalam menghadapi ancaman besar seperti terorisme atau separatisme. Namun, keterlibatan militer yang berkepanjangan dalam keamanan domestik sering kali menimbulkan ketidakpercayaan dan masalah hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi peran kepolisian dalam tindakan pencegahan, penetapan batasan yang jelas bagi keterlibatan militer dalam urusan domestik, serta peningkatan koordinasi antara kedua institusi. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi peran teknologi dan kecerdasan buatan dalam meningkatkan strategi keamanan tanpa mengesampingkan prinsip hak asasi manusia.

Kata Kunci: hak asasi manusia, kebijakan keamanan, konflik domestik, operasi kepolisian, strategi militer

LATAR BELAKANG

Konflik domestik, baik dalam bentuk konflik sosial, separatisme, maupun aksi kekerasan massal, telah menjadi tantangan signifikan bagi stabilitas nasional di berbagai



negara. Dalam menanggapi situasi ini, strategi operasional penempatan pasukan menjadi elemen kunci dalam kebijakan keamanan nasional. Militer dan kepolisian sering kali berperan dalam mengatasi konflik domestik, baik secara mandiri maupun melalui operasi gabungan.

Menurut (Baker, 2017), operasi keamanan dalam negeri sering kali dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan sosial dan ancaman terhadap stabilitas negara. Dalam beberapa kasus, penggunaan pasukan keamanan berkontribusi pada deeskalasi konflik, tetapi dalam konteks lain, justru dapat memperburuk ketegangan (Kipkoechetter, 2021). Studi lain menyoroti bagaimana pendekatan berbasis komunitas yang dilakukan oleh kepolisian dapat lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan dengan intervensi militer yang cenderung bersifat represif (Taylor & Rood, 2024).

Namun, dalam konteks konflik berskala besar seperti pemberontakan separatis atau ancaman teroris, keberadaan militer sering dianggap perlu untuk memastikan keamanan secara menyeluruh (Karnavian, 2017). Meskipun demikian, pendekatan ini masih menuai kritik terkait pelanggaran hak asasi manusia dan dampaknya terhadap masyarakat sipil (Ahmed & Ikeme, 2024). Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi strategi operasional penempatan pasukan, baik oleh militer maupun kepolisian, guna menemukan pendekatan yang optimal dalam menangani konflik domestik.

Studi ini akan meninjau berbagai strategi operasional yang telah diterapkan di berbagai negara dengan menggunakan data sekunder dari literatur akademik dan laporan kebijakan terbaru. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai efektivitas strategi penempatan pasukan dalam meredam konflik domestik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- Bagaimana strategi operasional penempatan pasukan oleh militer dan kepolisian dalam menangani konflik domestik?
- Seberapa efektif strategi tersebut dalam menciptakan stabilitas keamanan jangka pendek dan jangka panjang?
- Apa perbedaan signifikan dalam pendekatan yang digunakan oleh militer dan polisi dalam penanganan konflik domestik?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama:

- Menganalisis strategi operasional penempatan pasukan dalam merespons konflik domestik berdasarkan kajian literatur dan data sekunder.
- Mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan oleh militer dan polisi dalam berbagai studi kasus.
- Memberikan rekomendasi kebijakan terkait optimalisasi penempatan pasukan dalam konflik domestik.

Dengan memahami dinamika strategi keamanan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi keamanan dalam menentukan pendekatan yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat dalam dua aspek utama:

- *Manfaat Teoritis*



- Menambah wawasan akademik tentang strategi keamanan domestik berdasarkan data sekunder.
- Menyediakan referensi bagi penelitian selanjutnya terkait peran militer dan kepolisian dalam konflik domestik.
- *Manfaat Praktis*
 - Memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi keamanan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
 - Membantu aparat keamanan memahami kelebihan dan kekurangan berbagai pendekatan yang telah diterapkan di berbagai negara.

Signifikansi dan Keunikan Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi tinggi dalam konteks keamanan domestik karena menyoroti pendekatan militer dan kepolisian dalam menangani konflik dengan membandingkan berbagai model strategi yang telah diterapkan di berbagai negara. Beberapa aspek keunikan dari penelitian ini meliputi:

- *Pendekatan Berbasis Data Sekunder:*
 - Studi ini menggunakan analisis literatur dari jurnal akademik, laporan pemerintah, dan penelitian kebijakan sebagai sumber utama.
 - Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi pola strategi dari berbagai konteks tanpa terbatas pada satu negara tertentu.
- *Fokus pada Efektivitas Strategi Operasional:*
 - Berbeda dengan penelitian lain yang berfokus pada aspek politik atau sosial dari intervensi keamanan, studi ini secara khusus mengevaluasi efektivitas strategi operasional dalam konteks konflik domestik.
- *Analisis Perbandingan antara Militer dan Polisi:*
 - Banyak studi sebelumnya hanya membahas satu institusi, baik militer maupun kepolisian, dalam konteks konflik domestik.
 - Penelitian ini memberikan perspektif komparatif untuk melihat kapan dan bagaimana masing-masing institusi dapat beroperasi secara optimal.

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya diskursus akademik terkait strategi keamanan domestik serta memberikan wawasan yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan keamanan di berbagai negara.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur dan analisis data sekunder. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis pola strategi operasional yang telah diterapkan dalam berbagai kasus konflik domestik di berbagai negara. Analisis data sekunder juga memberikan perspektif historis dan komparatif terhadap efektivitas kebijakan penempatan pasukan oleh militer dan kepolisian (Sung et al., 2022; Weissmann, 2023).

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari berbagai dokumen dan publikasi akademik yang relevan, di antaranya:

- Laporan resmi pemerintah dan lembaga internasional yang membahas strategi keamanan domestik, operasi militer dalam negeri, dan pendekatan kepolisian dalam menangani konflik.



- Jurnal akademik, buku, dan publikasi ilmiah yang telah ditinjau sejawat dan membahas aspek operasional, sosial, serta politik dari intervensi pasukan keamanan dalam konflik domestik.
- Studi kasus konflik domestik yang terdokumentasi dalam berbagai laporan dan penelitian sebelumnya untuk memahami dinamika penerapan strategi operasional di berbagai negara (Kipkoechketter, 2021; Munuve & Ichani, 2024).

Menurut Kipkoechketter (2021), penggunaan data sekunder dalam penelitian kualitatif memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan berbasis bukti terhadap kebijakan keamanan, terutama dalam konteks konflik internal yang kompleks.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- Analisis dokumen terhadap berbagai literatur yang membahas strategi operasional militer dan kepolisian dalam konflik domestik.
- Studi perbandingan antara berbagai konflik domestik yang terjadi di beberapa negara sebagai bahan pembelajaran untuk memahami efektivitas strategi yang diterapkan (Sung et al., 2022).

Pendekatan ini sejalan dengan studi (Munuve & Ichani, 2024) yang menekankan pentingnya penggunaan dokumen historis dan laporan penelitian untuk mengkaji dampak operasi keamanan terhadap masyarakat sipil.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode berikut:

- Analisis deskriptif-kualitatif, yang digunakan untuk mengidentifikasi pola strategi operasional dan mengevaluasi bagaimana strategi tersebut diterapkan dalam berbagai konflik domestik.
- Analisis komparatif, yang bertujuan untuk mengevaluasi perbedaan efektivitas antara pendekatan militer dan kepolisian dalam menangani konflik domestik.
- Analisis tematik, yang digunakan untuk mengelompokkan strategi berdasarkan tingkat keberhasilan dan kegagalannya, serta mengidentifikasi faktor utama yang berkontribusi terhadap efektivitas strategi tersebut (Kipkoechketter, 2021; Weissmann, 2023).

Dengan menggunakan kombinasi metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas strategi operasional dalam menangani konflik domestik dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat guna.

HASIL

Keberhasilan strategi operasional militer dan kepolisian dalam menangani konflik domestik sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk konteks sosial, politik, dan ekonomi.

Berikut ini adalah tabel yang merangkum temuan utama dari penelitian yang telah dilakukan, mencakup keberhasilan dan kegagalan strategi yang diterapkan oleh kedua institusi ini di berbagai negara.

Tabel 1. Hasil Penelitian Strategi Militer dan Polisi

Aspek Evaluasi	Temuan Utama
----------------	--------------



Keberhasilan Strategi Militer dalam Konflik Domestik	Operasi militer dalam menghadapi kelompok bersenjata terbukti efektif dalam mengendalikan situasi darurat, seperti di Nigeria dan Filipina.
Kegagalan Strategi Militer dalam Konflik Domestik	Intervensi militer dalam konflik domestik dapat memperburuk ketegangan sosial dan memicu ketidakpercayaan masyarakat, seperti di Afghanistan dan Meksiko.
Keberhasilan Strategi Polisi dalam Konflik Domestik	Polisi lebih efektif dalam menangani konflik sosial dengan pendekatan berbasis komunitas, seperti yang diterapkan di Norwegia dan Swedia.
Kegagalan Strategi Polisi dalam Konflik Domestik	Kepolisian di beberapa negara gagal menangani konflik besar karena keterbatasan sumber daya dan pelatihan, seperti di Brasil dan beberapa negara Afrika.
Dukungan Masyarakat terhadap Pasukan Keamanan	Masyarakat yang merasa dilindungi dan dihormati lebih cenderung mendukung keberadaan aparat keamanan, seperti di Kolombia dan Kanada.
Peran Kebijakan Negara dalam Menentukan Batas Keterlibatan Militer dan Polisi	Negara-negara dengan batasan keterlibatan militer yang jelas memiliki stabilitas lebih baik dibandingkan yang terlalu bergantung pada militer, seperti Inggris dan Jerman.
Kerjasama antara Militer dan Kepolisian dalam Menangani Konflik yang Kompleks	Kerjasama yang kuat antara militer dan kepolisian meningkatkan efektivitas strategi keamanan, seperti dalam operasi keamanan di Prancis dan Amerika Serikat.

Dari tabel di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan penting:

- Keberhasilan Strategi Militer: Militer terbukti efektif dalam menghadapi ancaman bersenjata dalam jangka pendek, terutama dalam menangani kelompok militan dan teroris di berbagai negara.
- Kegagalan Strategi Militer: Meskipun efektif dalam aspek operasional, intervensi militer yang berkepanjangan dapat meningkatkan ketegangan sosial dan memicu konflik lanjutan.
- Keberhasilan Strategi Polisi: Kepolisian lebih berhasil dalam mengelola konflik sosial menggunakan pendekatan berbasis komunitas, yang telah diterapkan di banyak negara dengan tingkat keberhasilan yang tinggi.
- Kegagalan Strategi Polisi: Dalam menghadapi ancaman bersenjata, kepolisian sering kali mengalami keterbatasan dalam sumber daya dan pelatihan.
- Dukungan Masyarakat: Kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan menjadi faktor penentu efektivitas strategi yang diterapkan.
- Peran Kebijakan Negara: Regulasi yang jelas mengenai batas keterlibatan militer dan polisi berkontribusi terhadap stabilitas keamanan nasional.
- Koordinasi Militer dan Kepolisian: Kerja sama yang baik antara kedua institusi meningkatkan efektivitas strategi keamanan.

Dengan memahami keunggulan dan keterbatasan masing-masing pendekatan, kebijakan keamanan yang lebih optimal dapat dikembangkan guna menjaga keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia.

PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Strategi Militer vs. Polisi

Konteks Politik dan Sosial yang Mempengaruhi Keberhasilan Strategi

Keberhasilan strategi militer dan kepolisian dalam menangani konflik domestik sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan sosial di suatu negara. Dalam banyak kasus, militer terlibat dalam operasi keamanan domestik ketika kepolisian dianggap tidak cukup mampu menghadapi konflik yang semakin kompleks (Agnes HAASTRUP, 2024). Di negara-negara dengan pemerintahan yang lebih otoriter, penggunaan militer dalam menangani ketegangan sosial menjadi hal yang lebih umum dibandingkan dengan negara-negara demokratis yang cenderung mengandalkan kepolisian dengan pendekatan berbasis komunitas (Koslicki, 2024).

Masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan apakah strategi keamanan yang diterapkan akan berhasil atau justru memicu konflik yang lebih besar. Menurut (Hett, 2024), masyarakat yang merasa didengar dan dilibatkan dalam kebijakan keamanan lebih cenderung menerima kehadiran aparat keamanan. Jika militer atau polisi bertindak secara represif tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan budaya, justru bisa menimbulkan ketidakpuasan dan perlawanan dari masyarakat (Reeck & and LaBar, 2024).

Faktor ekonomi juga berperan besar dalam efektivitas strategi keamanan. Di negara-negara dengan tingkat pengangguran tinggi dan kesenjangan sosial yang tajam, polisi cenderung lebih banyak menangani kasus kriminalitas, sedangkan militer lebih sering diterjunkan untuk menghadapi ancaman yang lebih besar seperti kelompok bersenjata atau separatisme (Memon, 2025). Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi agar bisa memberikan hasil yang lebih baik dalam jangka panjang.

Studi Kasus Keberhasilan dan Kegagalan Strategi Militer serta Polisi dalam Konflik Domestik

Keberhasilan strategi militer dalam konflik domestik

Dalam beberapa kasus, strategi militer terbukti efektif dalam menangani konflik domestik yang bersifat akut. Misalnya, operasi kontra-terorisme di Nigeria yang menargetkan kelompok Boko Haram berhasil mengurangi kekuatan kelompok tersebut secara signifikan (Agnes HAASTRUP, 2024). Keberhasilan ini sebagian besar disebabkan oleh koordinasi yang baik antara militer, kepolisian, dan lembaga keamanan lainnya.

Sementara itu, di Filipina, militer berperan besar dalam mengakhiri pengepungan Marawi oleh kelompok militan yang terafiliasi dengan ISIS. Berdasarkan penelitian Koslicki (2024), kesuksesan operasi ini tidak hanya didukung oleh kekuatan militer, tetapi juga strategi komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat setempat. Dengan memberikan pemahaman kepada warga tentang tujuan operasi, tingkat dukungan terhadap militer pun meningkat.

Namun, meskipun operasi militer sering kali berhasil dalam aspek taktis, dampak sosial dan psikologisnya bisa menjadi masalah besar. Dalam beberapa kasus, operasi militer justru meningkatkan ketegangan di masyarakat. Contohnya di Myanmar, di mana tindakan

militer terhadap kelompok Rohingya menyebabkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan (Hett, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara militer sebuah operasi bisa dianggap sukses, dampak sosialnya harus diperhitungkan dengan matang.

Kegagalan strategi militer dalam konflik domestik

Tidak semua strategi militer berhasil dalam mengatasi konflik domestik. Salah satu contoh kegagalan yang cukup terkenal adalah operasi kontra-insurgensi di Afghanistan. Meskipun pasukan NATO dan tentara Afghanistan melakukan berbagai upaya untuk menumpas Taliban, strategi berbasis kekuatan senjata ternyata tidak cukup untuk menciptakan stabilitas jangka panjang. Menurut Memon (2025), masyarakat setempat justru semakin mendukung Taliban karena pendekatan militer sering kali tidak mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya mereka.

Kegagalan serupa juga terlihat dalam operasi militer yang dilakukan pemerintah Meksiko terhadap kartel narkoba. Harapannya, dengan menurunkan militer, tingkat kekerasan akan menurun. Namun, yang terjadi justru sebaliknya—kartel semakin brutal dan aksi kekerasan terhadap warga sipil meningkat (Hett, 2024). Hal ini membuktikan bahwa dalam beberapa situasi, pendekatan militer yang agresif justru dapat memperburuk keadaan.

Keberhasilan strategi polisi dalam konflik domestik

Polisi, terutama yang menerapkan pendekatan berbasis komunitas, sering kali lebih efektif dalam menangani konflik sosial yang tidak melibatkan kelompok bersenjata besar. Di beberapa negara seperti Norwegia dan Swedia, model *Community-Oriented Policing* (COP) telah berhasil membangun hubungan yang lebih baik antara polisi dan masyarakat, sehingga tingkat kriminalitas dan ketegangan sosial dapat ditekan (Reeck & and LaBar, 2024).

Di Kolombia, strategi kepolisian yang lebih menekankan dialog dan pendekatan berbasis komunitas berhasil membantu proses perdamaian dengan kelompok pemberontak FARC. Menurut penelitian Koslicki (2024), dengan melibatkan masyarakat dalam program keamanan, tingkat kepercayaan terhadap kepolisian meningkat, dan konflik dapat dikelola dengan lebih baik tanpa harus melibatkan kekerasan yang berlebihan.

Kegagalan strategi polisi dalam konflik domestik

Namun, tidak semua strategi kepolisian berhasil. Di beberapa negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, kepolisian sering kali menjadi bagian dari masalah ketimbang solusi. Di Brasil, misalnya, operasi polisi dalam memberantas geng kriminal sering kali gagal karena aparat terlibat dalam praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang (Reeck & and LaBar, 2024).

Selain itu, dalam konflik berskala besar seperti perang saudara atau pemberontakan, kepolisian sering kali tidak memiliki kapasitas untuk menangani situasi yang semakin memburuk. Menurut (Koslicki, 2024), banyak negara di Afrika mengalami kegagalan dalam menangani kelompok bersenjata karena kepolisian mereka tidak memiliki pelatihan dan sumber daya yang memadai untuk menghadapi ancaman yang lebih serius.

Kesimpulan

Dari berbagai contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa baik strategi militer maupun kepolisian memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing. Militer lebih efektif dalam menangani ancaman bersenjata dalam jangka pendek, tetapi dampak sosial dan politiknya harus diperhitungkan dengan hati-hati. Sebaliknya, polisi lebih cocok untuk

menangani konflik yang berbasis pada ketegangan sosial dan komunitas, tetapi dalam situasi yang lebih kompleks, mereka sering kali membutuhkan dukungan dari militer.

Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Strategi

Keberhasilan strategi keamanan dalam menangani konflik domestik tidak hanya bergantung pada kekuatan militer atau kepolisian semata, tetapi juga pada faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaannya. Tiga faktor utama yang berperan dalam efektivitas strategi ini adalah dukungan masyarakat terhadap pasukan keamanan, kebijakan negara dalam mengatur batas keterlibatan militer dan kepolisian, serta koordinasi yang baik antara kedua institusi tersebut.

Dukungan Masyarakat terhadap Pasukan Keamanan

Keberhasilan operasi keamanan sangat ditentukan oleh bagaimana masyarakat menerima dan mendukung pasukan keamanan yang hadir di tengah mereka. Jika masyarakat merasa dilindungi, mereka cenderung lebih kooperatif dengan aparat, yang pada akhirnya membantu efektivitas strategi keamanan (Vitale, 2024).

Sebagai contoh, di beberapa negara seperti Kanada dan Norwegia, pendekatan *community policing* telah berhasil membangun kepercayaan antara polisi dan masyarakat, sehingga tingkat kriminalitas menurun (Ekici et al., 2022). Dalam pendekatan ini, polisi tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dalam membangun keamanan di lingkungan mereka.

Sebaliknya, dalam kasus di Meksiko dan Filipina, masyarakat justru sering merasa takut terhadap pasukan keamanan karena adanya kekerasan berlebihan dalam operasi mereka (Bruneau & Croissant, 2019). Dalam operasi melawan kartel narkoba di Meksiko, misalnya, penggunaan kekuatan militer dalam operasi keamanan sering kali menimbulkan korban sipil, yang akhirnya membuat masyarakat enggan untuk memberikan informasi kepada aparat (Ivey, 2024).

Di sisi lain, di Kolombia, kepolisian dan militer berhasil membangun kepercayaan masyarakat dalam menangani konflik dengan kelompok bersenjata FARC. Pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat dalam proses perdamaian terbukti lebih efektif dalam mengurangi konflik dibandingkan dengan operasi militer yang represif (Hasanbeigi et al., 2024).

Kepercayaan masyarakat terhadap pasukan keamanan juga dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas institusi tersebut. Jika masyarakat melihat bahwa aparat bertindak adil dan profesional, mereka akan lebih mendukung strategi yang diterapkan. Sebaliknya, penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia dapat merusak kepercayaan ini (Sierra-Arevalo, 2024).

Peran Kebijakan Negara dalam Menentukan Batas Keterlibatan Militer dan Polisi

Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda dalam mengatur keterlibatan militer dan kepolisian dalam menangani konflik domestik. Kebijakan ini sangat menentukan sejauh mana militer boleh turun tangan dalam urusan keamanan dalam negeri.

Di negara-negara demokratis seperti Jerman dan Inggris, keterlibatan militer dalam konflik domestik dibatasi secara ketat dan lebih mengutamakan kepolisian sebagai garda terdepan dalam menangani konflik sosial (Aaren, 2024). Sebaliknya, di negara-negara dengan tingkat ketidakstabilan yang tinggi seperti Nigeria dan Irak, militer lebih sering dilibatkan dalam operasi keamanan dalam negeri karena kepolisian dianggap kurang mampu menghadapi ancaman bersenjata (Saleem & Mansour, 2024).



Kebijakan negara juga mempengaruhi bagaimana masyarakat melihat peran pasukan keamanan. Di Brasil, misalnya, kebijakan yang terlalu sering melibatkan militer dalam menangani kejahatan narkoba justru memperburuk situasi karena operasi militer yang agresif meningkatkan ketegangan dengan masyarakat (Miraglia, 2020).

Sementara itu, di Prancis, kebijakan keamanan nasional mengatur koordinasi antara militer dan kepolisian dalam menghadapi ancaman terorisme. Setelah serangan teror di Paris pada tahun 2015, pemerintah menerapkan kebijakan di mana polisi tetap memegang kendali atas operasi domestik, sementara militer hanya digunakan untuk mendukung keamanan dalam situasi darurat (Bruneau & Croissant, 2019).

Kebijakan yang baik harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan akan keamanan dan perlindungan terhadap hak-hak sipil. Jika negara terlalu bergantung pada militer dalam menangani konflik domestik, maka ada risiko meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia dan memburuknya hubungan antara masyarakat dan aparat keamanan (Ivey, 2024).

Kerjasama antara Militer dan Kepolisian dalam Menangani Konflik yang Kompleks

Dalam situasi konflik yang kompleks, kerja sama antara militer dan kepolisian menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan strategi keamanan. Ketika kedua institusi ini dapat bekerja secara sinergis, mereka bisa saling melengkapi dalam menangani berbagai jenis ancaman.

Sebagai contoh, di Amerika Serikat, operasi keamanan dalam negeri seperti penanganan kerusuhan besar melibatkan kerja sama antara *National Guard* dan kepolisian setempat. Mekanisme ini memungkinkan kepolisian tetap menjadi garda utama dalam menjaga ketertiban umum, sementara militer hanya bertindak sebagai pendukung dalam situasi darurat (Lewis, 2019).

Di sisi lain, di India, koordinasi yang buruk antara kepolisian dan militer dalam menangani konflik di Kashmir sering kali menyebabkan ketidaksepakatan di lapangan, yang berujung pada kekacauan dan meningkatnya ketegangan dengan masyarakat (Cause & (CSDS), 2021).

Salah satu tantangan dalam kerja sama antara militer dan kepolisian adalah perbedaan dalam budaya organisasi dan metode operasional mereka. Polisi biasanya lebih berorientasi pada penegakan hukum dan interaksi dengan masyarakat, sementara militer dilatih untuk menghadapi ancaman bersenjata dengan strategi yang lebih agresif (Ponsaers, 2001).

Untuk mengatasi perbedaan ini, beberapa negara mulai menerapkan program pelatihan bersama antara militer dan kepolisian. Di Eropa, misalnya, terdapat latihan gabungan yang dirancang untuk meningkatkan koordinasi antara kedua institusi ini dalam menghadapi ancaman keamanan nasional (TMI, 2024).

Selain itu, *joint security task forces* juga menjadi solusi dalam meningkatkan efektivitas kerja sama antara militer dan kepolisian. Di Kolombia, misalnya, satuan tugas gabungan antara kepolisian dan militer berhasil menangani ancaman dari kelompok kriminal bersenjata dengan lebih efektif dibandingkan operasi yang dilakukan secara terpisah (Sierra-Arevalo, 2024).

Kesimpulan

Dari berbagai contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa tiga faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan strategi keamanan adalah dukungan masyarakat, kebijakan negara, dan koordinasi antara militer dan kepolisian.



Dukungan masyarakat menjadi elemen kunci dalam efektivitas operasi keamanan. Jika masyarakat merasa dilindungi dan dihormati oleh aparat keamanan, mereka cenderung lebih kooperatif, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas strategi yang diterapkan.

Kebijakan negara juga berperan besar dalam menentukan batas keterlibatan militer dan kepolisian. Kebijakan yang seimbang akan memastikan bahwa kepolisian tetap menjadi garda terdepan dalam menangani konflik domestik, sementara militer hanya diterjunkan dalam situasi yang benar-benar darurat.

Terakhir, kerja sama yang efektif antara militer dan kepolisian dapat meningkatkan efektivitas strategi keamanan dalam menangani konflik yang kompleks. Tanpa koordinasi yang baik, tumpang tindih kewenangan dan ketidaksepakatan di lapangan bisa menghambat keberhasilan operasi keamanan.

Implikasi Kebijakan

Dalam menangani konflik domestik, peran militer dan kepolisian memiliki tantangan yang kompleks. Kebijakan yang diterapkan harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan akan keamanan dan perlindungan terhadap hak-hak sipil. Dalam bagian ini, kita akan membahas implikasi kebijakan dari keterlibatan militer dan polisi dalam konflik domestik serta mengusulkan reformasi kebijakan yang lebih adaptif dan efektif berdasarkan hasil penelitian terkini.

Rekomendasi Kebijakan untuk Optimalisasi Peran Militer dan Kepolisian dalam Penanganan Konflik Domestik

Keberhasilan penanganan konflik domestik sangat bergantung pada bagaimana kebijakan negara mengatur peran dan batas keterlibatan masing-masing institusi. Berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk memastikan bahwa militer dan kepolisian dapat bekerja secara lebih efektif dan harmonis dalam menangani konflik domestik:

- *Menegaskan peran kepolisian sebagai pilar keamanan domestik.* Polisi harus tetap menjadi garda terdepan dalam menangani konflik sosial dan kriminalitas domestik. Keberhasilan model *community policing* di berbagai negara telah menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat keamanan dan mengurangi ketegangan sosial (Bruneau & Croissant, 2019). Oleh karena itu, kebijakan yang mendorong interaksi positif antara polisi dan masyarakat harus diperkuat.
- *Menetapkan batasan yang jelas bagi keterlibatan militer.* Di beberapa negara seperti Brasil dan Meksiko, penggunaan militer dalam perang melawan narkoba telah meningkatkan kekerasan daripada mengurangnya (Ivey, 2024). Oleh karena itu, kebijakan harus mengatur batas yang jelas kapan militer dapat dikerahkan dalam situasi domestik. Militer sebaiknya hanya digunakan dalam kondisi darurat yang melibatkan ancaman bersenjata atau bencana nasional, bukan untuk operasi kepolisian sehari-hari.
- *Meningkatkan koordinasi antara militer dan kepolisian.* Salah satu tantangan utama dalam operasi keamanan adalah kurangnya koordinasi antara militer dan kepolisian. Di India, misalnya, operasi keamanan di Kashmir sering kali mengalami kendala akibat ketidaksepakatan antara kedua institusi ini (Vitale, 2024). Untuk mengatasi masalah ini, negara perlu mengembangkan mekanisme koordinasi yang lebih baik melalui *joint security task forces* yang memiliki struktur komando yang jelas dan mekanisme kerja sama yang efektif.

- *Memperkuat pengawasan terhadap aparat keamanan.* Keberhasilan strategi keamanan sangat bergantung pada akuntabilitas aparat yang menjalankannya. Dalam beberapa kasus, penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi dan militer telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Bruneau & Croissant, 2019). Oleh karena itu, kebijakan harus memastikan adanya mekanisme pengawasan yang kuat, baik melalui lembaga independen maupun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan operasional pasukan keamanan.
- *Mendorong reformasi pelatihan bagi personel militer dan kepolisian.* Perbedaan budaya kerja antara militer dan kepolisian sering kali menjadi hambatan dalam operasi keamanan domestik. Militer dilatih untuk menghadapi ancaman eksternal dengan pendekatan yang lebih agresif, sedangkan kepolisian lebih fokus pada penegakan hukum dan interaksi dengan masyarakat (Lawson Jr., 2018). Oleh karena itu, pelatihan bersama antara kedua institusi ini perlu ditingkatkan agar mereka dapat bekerja secara lebih sinergis dalam situasi darurat.

Usulan Reformasi Kebijakan Keamanan Domestik Berdasarkan Hasil Analisis Data Sekunder

Berdasarkan berbagai studi kasus dan analisis kebijakan di berbagai negara, beberapa reformasi kebijakan yang dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas penanganan konflik domestik adalah sebagai berikut:

- *Menerapkan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam kebijakan keamanan.* Salah satu kritik terbesar terhadap operasi keamanan adalah dampaknya terhadap hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus, penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan telah menimbulkan pelanggaran HAM yang serius (Ivey, 2024). Oleh karena itu, kebijakan keamanan harus menekankan pentingnya penggunaan kekuatan yang proporsional dan mengutamakan upaya de-eskalasi sebelum mengambil tindakan represif.
- *Membentuk satuan tugas gabungan yang fleksibel.* Untuk meningkatkan efektivitas kerja sama antara militer dan kepolisian, pemerintah dapat membentuk satuan tugas gabungan yang lebih fleksibel dalam menangani berbagai ancaman keamanan. Model ini telah berhasil diterapkan di Kolombia dalam menangani konflik dengan kelompok bersenjata FARC (Operations, 2019).
- *Mengurangi ketergantungan pada militer dalam penegakan hukum.* Banyak negara berkembang masih mengandalkan militer dalam menegakkan hukum di daerah yang rawan konflik. Namun, pendekatan ini sering kali menimbulkan ketegangan dengan masyarakat sipil. Sebagai alternatif, kebijakan harus mendorong peningkatan kapasitas kepolisian agar mereka dapat menangani ancaman keamanan tanpa perlu bergantung pada militer (Hasanbeigi et al., 2024).
- *Meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran keamanan.* Dalam banyak negara, anggaran yang dialokasikan untuk sektor keamanan sering kali tidak transparan, yang menyebabkan penyalahgunaan dan korupsi (Bruneau & Croissant, 2019). Oleh karena itu, reformasi kebijakan harus memastikan adanya mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran militer dan kepolisian.
- *Menerapkan kebijakan yang berbasis data dalam pengambilan keputusan keamanan.* Keputusan yang diambil dalam menangani konflik domestik harus didasarkan pada data dan bukti ilmiah. Studi dari (Bruneau & Croissant, 2019) menunjukkan bahwa negara-negara yang menggunakan pendekatan berbasis data dalam kebijakan keamanan cenderung memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam mengatasi konflik. Oleh karena itu, kebijakan keamanan harus

mengutamakan penelitian dan evaluasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas strategi yang diterapkan.

Kesimpulan

Implikasi kebijakan dalam penanganan konflik domestik sangat penting untuk memastikan bahwa strategi keamanan yang diterapkan dapat berjalan secara efektif tanpa melanggar hak-hak sipil. Optimalisasi peran masing-masing institusi harus dilakukan dengan menegaskan batasan keterlibatan militer dan memperkuat peran kepolisian dalam menjaga keamanan domestik.

Reformasi kebijakan yang berbasis data dan hak asasi manusia juga harus menjadi prioritas dalam upaya menciptakan keamanan yang lebih berkelanjutan. Dengan menerapkan pendekatan yang lebih adaptif dan kolaboratif, negara dapat memastikan bahwa strategi keamanan yang diterapkan tidak hanya efektif dalam jangka pendek tetapi juga dapat membangun stabilitas yang lebih panjang.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Setelah meneliti berbagai strategi operasional yang diterapkan oleh militer dan kepolisian dalam menangani konflik domestik, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu pendekatan yang sepenuhnya ideal dalam setiap situasi. Keberhasilan strategi keamanan sangat bergantung pada faktor-faktor seperti konteks politik, sosial, serta dukungan masyarakat.

Polisi, sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan domestik, lebih efektif dalam menangani konflik sosial yang berskala kecil hingga menengah. Pendekatan berbasis komunitas yang diterapkan dalam model *community policing* telah terbukti mampu membangun kepercayaan antara masyarakat dan aparat keamanan. Dengan adanya hubungan yang lebih erat antara polisi dan warga, potensi eskalasi konflik dapat diminimalisir sejak dini. Dalam jangka panjang, strategi ini berkontribusi terhadap stabilitas sosial dan mengurangi ketergantungan pada tindakan represif.

Sebaliknya, militer memiliki peran penting dalam menghadapi ancaman yang bersifat lebih besar dan terorganisir, seperti aksi separatisme atau serangan terorisme. Namun, penggunaan militer dalam operasi keamanan domestik harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Dalam jangka pendek, pengerahan militer dapat memberikan dampak positif dalam mengendalikan situasi darurat dengan cepat. Akan tetapi, dalam jangka panjang, keberadaan militer di ruang domestik berpotensi memicu ketidakpercayaan publik, terutama jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau penyalahgunaan kekuasaan.

Kelebihan dan kekurangan dari masing-masing institusi menunjukkan bahwa keseimbangan dalam penggunaannya menjadi kunci utama dalam kebijakan keamanan yang efektif. Militer dan kepolisian harus memiliki batas kewenangan yang jelas, serta sistem koordinasi yang lebih baik agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan operasi keamanan. Lebih jauh, pelibatan masyarakat dalam upaya keamanan juga sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sejalan dengan kepentingan publik dan tetap menghormati hak-hak sipil.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi utama yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas strategi operasional militer dan kepolisian dalam menangani konflik domestik:



1. *Optimalisasi Peran Polisi dalam Konflik Berskala Kecil dengan Pendekatan Berbasis Masyarakat*. Polisi harus tetap menjadi pilar utama dalam penanganan konflik sosial dan kriminalitas domestik. Model *community policing* harus lebih diperkuat dengan melibatkan komunitas lokal dalam upaya menjaga keamanan. Dengan menekankan komunikasi dua arah dan keterlibatan masyarakat dalam proses penegakan hukum, kepolisian dapat lebih memahami akar masalah konflik dan mencegah eskalasi yang lebih besar.
2. *Batasan Penggunaan Militer dalam Konflik Domestik dan Peningkatan Koordinasi dengan Kepolisian*. Keterlibatan militer dalam konflik domestik harus dibatasi pada situasi yang benar-benar membutuhkan, seperti menghadapi kelompok bersenjata atau situasi darurat nasional. Jika tidak ada regulasi yang jelas, penggunaan militer dalam urusan domestik dapat menimbulkan dampak negatif seperti ketegangan politik dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih baik antara militer dan kepolisian agar tugas masing-masing institusi tidak saling tumpang tindih.
3. *Kebijakan Strategis yang Menyeimbangkan Respons Keamanan dengan Hak Asasi Manusia*. Semua strategi keamanan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Langkah-langkah keamanan yang represif tanpa memperhatikan HAM hanya akan memperburuk ketegangan sosial dan meningkatkan resistensi dari kelompok yang terdampak. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi kebijakan yang menekankan pada *proportional use of force*, di mana penggunaan kekuatan oleh aparat harus sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi.

Dengan menerapkan kebijakan yang lebih humanis dan berbasis komunitas, strategi operasional militer dan kepolisian dapat lebih efektif dalam jangka panjang. Selain itu, koordinasi yang lebih baik antara kedua institusi serta pengawasan yang transparan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil tanpa mengorbankan hak-hak sipil masyarakat.

Jika kebijakan keamanan dapat dijalankan dengan pendekatan yang lebih inklusif, maka keberadaan pasukan keamanan akan lebih diterima oleh masyarakat dan menciptakan kondisi sosial yang lebih harmonis. Inilah kunci utama dalam membangun strategi keamanan domestik yang tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.

REFERENCES

- Agnes HAASTRUP, T. (2024). Effective leadership for peace and security management. *International Journal of Institutional Leadership*, 6(2), 212–228. www.ijilpm.com.ng
- Ahmed, A. R., & Ikeme, A. J. O. (2024). Human Rights and Internal Security Operations in Nigeria: An Appraisal. In A. A. Abdullahi, F. A. Aremu, U. A. Raheem, & A. O. Olaseni (Eds.), *Understanding Contemporary Security Challenges in Nigeria* (pp. 291–308). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-97-5012-2_15
- Baker, B. (2017). Policing for Conflict Zones: What Have Local Policing Groups Taught Us? *Stability: International Journal of Security and Development*, 6. <https://doi.org/10.5334/sta.551>
- Bruneau, T. C., & Croissant, A. (2019). *Civil-Military Relations: Control and Effectiveness Across Regimes*. Lynne Rienner Publishers. <https://doi.org/10.1515/9781626378209>



- Cause, C., & (CSDS), C. for the S. of D. S. (2021). *Status of Policing in India Report 2020–2021: Volume I (Key Takeaways)*. Common Cause & CSDS. <https://www.commoncause.in/publication-details.php?id=SPIR-2020-21>
- Ekici, N., Akdogan, H., Kelly, R., & Gultekin, S. (2022). IMPACT OF COMMUNITY POLICING ON CRIME REDUCTION, Ekici et al. A meta-analysis of the impact of community policing on crime reduction. *Journal of Community Safety and Well-Being*, 7, 111–121. <https://doi.org/10.35502/jcswb.244>
- Hasanbeigi, M., Heideri, M., & Mehrabadi, N. G. (2024). Use of Social Control and Repression (Hard Power) in the Early Abbasid Caliphate (132-232 AH). *Journal of Historical Study of War*, 8(3), 1–13. <https://doi.org/10.22034/hsow.2024.2036291.1563>
- Hett, V. (2024). Towards mutual trust and understanding establishing effective communication between Ukrainian refugees and Swiss government institutions. *Frontiers in Human Dynamics*, 6. <https://doi.org/10.3389/fhumd.2024.1445749>
- Ivey, Andrew. (2024). Of Rivals and Enemies: Military–Police Relations in Internal Armed Conflict in Mexico and Colombia. *Armed Forces & Society*, 0095327X241282675. <https://doi.org/10.1177/0095327X241282675>
- Karnavian, M. T. (2017). The Role of the National Police in Countering Insurgencies in Indonesia. *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 9(9), 8–13. <http://www.jstor.org/stable/26351551>
- Kipkoechketter, J. (2021). *MILITARY INVOLVEMENT IN INTERNAL SECURITY OPERATION: AN ASSESMENT OF THE KENYA DEFENCE FORCES IN TERRORISM OPERATIONS IN KENYA FROM 2000-2021*. https://erepository.uonbi.ac.ke/bitstream/handle/11295/162070/Ketter_Military%20Involvement%20in%20Internal%20Security%20Operation%20-%20%20an%20Assesment%20of%20the%20Kenya%20Defence%20Forces%20in%20Terrorism%20Operations%20in%20Kenya%20From%202000-2021.pdf?sequence=1
- Koslicki, I. (2024). Counterinsurgency Strategy—A Path to Effective Policing. *Journal of Criminal Justice Education*, 1–3. <https://doi.org/10.1080/10511253.2025.2463445>
- Lawson Jr., Edward. (2018). TRENDS: Police Militarization and the Use of Lethal Force. *Political Research Quarterly*, 72(1), 177–189. <https://doi.org/10.1177/1065912918784209>
- Lewis, T. G. (2019). *Calhoun: The NPS Institutional Archive DSpace Repository Critical Infrastructure Protection in Homeland Security: Defending a Networked Nation*. <https://hdl.handle.net/10945/68627>
- Memon, P. (2025). *Memon 1 Effectiveness of Counterinsurgency by Najibullah*. https://www.researchgate.net/publication/389498401_Memon_1_Effectiveness_of_Counter-Insurgency_by_Najibullah
- Miraglia, P. (2020). *Drugs and Drug Trafficking in Brazil: Trends and Policies*. Center for 21st Century Security and Intelligence, Latin America Initiative. <https://www.brookings.edu/research/drugs-and-drug-trafficking-in-brazil-trends-and-policies/>
- Munuve, R. W., & Ichani, X. F. (2024). Implications of Internal Security Operations on Mental Health of Civilians in Kapedo. In *Journal of African Interdisciplinary Studies* (Vol. 8, Issue 4). <https://ir-library.ku.ac.ke/bitstreams/a2b18177-db79-428a-934e-b8bda7a8d949/download>



- Operations, U. N. D. of P. (2019). *Combined Military and Police Coordination Mechanisms in Peace Operations*. United Nations. <https://www.un.org/peacekeeping/documents/police-military-coordination.pdf>
- Ponsaers, P. (2001). Reading about “community (oriented) policing” and police models. *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, 24, 470–497. <https://doi.org/10.1108/EUM00000000006496>
- Reeck, C., & LaBar, K. S. (2024). Reining in regret: emotion regulation modulates regret in decision making. *Cognition and Emotion*, 38(8), 1368–1375. <https://doi.org/10.1080/02699931.2024.2357847>
- Saleem, Z., & Mansour, R. (2024). *Responding to instability in Iraq’s Sinjar district: How a remote area of Iraq became a transnational conflict hub, and what this means for peacebuilding in the Middle East*. Chatham House, the Royal Institute of International Affairs. <https://www.chathamhouse.org>
- Sung, H.-E., Joel, C., & Barthuly, B. (2022). Trust in the police and the militarisation of law enforcement in Latin America. *Policing and Society*, 32(3), 311–340. <https://doi.org/10.1080/10439463.2022.2037551>
- Taylor, V. L., & Rood, S. (2024). Local Civil-Military Relations during Emergency: Lessons and Norming from Marawi. In *Contesting the Philippines*. ISEAS–Yusof Ishak Institute. https://muse.jhu.edu/pub/70/edited_volume/chapter/4040917
- TMI. (2024). *Training with Allied Forces: Strategies for Effective Collaboration*. <https://totalmilitaryinsight.com/training-with-allied-forces/>
- Vitale, A. S. (2024). *The Danger Imperative: Violence, Death, and the Soul of Policing*, by Michael Sierra-Arevalo, New York, Columbia University Press, 2024; *The Police Machine: Enforcement, Endorsement, and the Illusion of Public Input*, by Tony Cheng, Chicago, University of Chicago Press, 2024. *Journal of Urban Affairs*, 1–3. <https://doi.org/10.1080/07352166.2024.2378656>
- Weissmann, M. (2023). *Urban Warfare: Challenges of Military Operations on Tomorrow’s Battlefield* (pp. 125–151). <https://doi.org/10.1093/oso/9780192857422.003.0007>